

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PARALAYANG WAYU DI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI

Puteri Mashita¹; Mahfuzat ²; Fahmi Surya Abdi³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; puterimasnita.02@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; mahfuzatlamakampali@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; fahmisuryaabdi20@gmail.com

*Correspondence : puterimasnita.02@gmail.com

ARTICLE INFO:

Collaborative Governance.
Pengelolaan pariwisata, kabupaten
sigi.

Received. : 25/02/2025

Revised. :

Accepted : 20/03/2025

ABSTRAK:

Introduction: Objek wisata Paralayang Wayu telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sigi. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan didalam mengelola objek wisata tersebut. Maka dari itu tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu kabupaten sigi. Teori yang di gunakan yaitu dari Ansel and Gash 2008 dimana memiliki 5 aspek yaitu *face to face dialog, trust building, Commitment to process, share understanding, intermediate outcomes*.

Methods: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada dinas pariwisata kabupaten sigi, pemerintah desa wayu, Masyarakat yang tinggal di desa wayu, pengelola objek wisata, pengunjung destinasi wisata, dan dokumen seperti profil dinas dan profil desa dan data lainnya yang berhubungan dengan topik.

Results: Hasil penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antar pihak-pihak belum berjalan secara optimal. Tantangan untuk komunikasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan, dan rendahnya komitmen. Namun Upaya perbaikan telah dimulai, seperti dialog tatap muka, Pembangunan kepercayaan, dan peningkatan pemahaman Bersama.

Conclusion: Penelitian ini pada pemahaman pentingnya tata Kelola inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Implikasinya dapat mendorong pengembangan paralayang wayu sebagai destinasi unggulan dan menjadi model bagi pengelolaan wisata lain di kabupaten sigi.

Introduction / Pendahuluan

Pengelolaan *industry* pariwisata Sebuah wilayah berperan penting dalam upaya meningkatkan penghasilan asli daerah dengan memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya (Faradin & Fanida, 2021). pengelolaan paralayang Wayu dalam konteks pengelolaan objek wisata paralayang Wayu di Kabupaten Sigi memakai konsep *collaborative governance* menjadi sangat relevan dan penting (Nurnaningsih et al., 2023). Hal ini berkaitan langsung dengan tantangan dan problem yang dihadapi paralayang Wayu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Konsep *collaborative governance* juga merujuk pada pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak, sehingga

peran masing-masing *stakeholder* menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menciptakan regulasi dan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi, sementara warga lokal dan *stakeholder* wajib berkontribusi dalam pelaksanaan. Pengelolaan berbasis kolaborasi juga mencakup pelibatan dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi (Kurniawan & Putra, 2021). Riset ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kerjasama antara pemerintah setempat dan komunitas dalam pengelolaan destinasi wisata paralayang wayu.

Ada beberapa problem yang terjadi didaerah obyek wisata paralayang Wayu yaitu, Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur di objek wisata paralayang Wayu masih belum optimal dan kurang terawat dengan baik dikarenakan dana yang salurkan dari pemerintah daerah yang sangat minim, sehingga Membuat pengunjung merasa kurang nyaman dalam menjalani aktivitas pariwisata. Adapun problem lain yang timbul ialah kurangnya sistem promosi pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan bisa merespons kebutuhan warga yang mengunjungi objek wisata paralayang Wayu dengan baik dalam rangka pengelolaan yang efektif. Dengan itu, penting bagi pemerintah daerah untuk punya kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah secara efisien, guna mendukung peningkatan taraf hidup warga dan wilayahnya. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Sigi punya tanggung jawab untuk terus tingkatkan kinerjanya dalam kelola potensi wisata di paralayang Wayu, terutama dalam sektor pariwisata, yang diharapkan bisa berkontribusi pada kesejahteraan warga, bangsa, dan negara.

Tujuan dari riset ini ialah untuk mengeksplorasi pemahaman mengenai bagaimana *collaborative governance* bisa diimplementasikan secara efektif antara pemerintah daerah dan warga setempat dalam upaya mengatasi problem kompleks yang dihadapi oleh paralayang Wayu.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan objek wisata tersebut, dengan peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima informan yang relevan, yaitu pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pengunjung objek wisata, untuk menggali informasi terkait pengelolaan dan tantangan yang dihadapi. Observasi dilakukan langsung di lokasi untuk mengamati kondisi dan interaksi yang terjadi di sekitar objek wisata. Selain itu, dokumentasi juga digunakan

untuk mendukung data yang diperoleh, seperti laporan, arsip, dan peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memahami makna yang terkandung dalam data dan menghubungkannya dengan teori-teori relevan.

Result / Hasil

Untuk melaksanakan *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu antara dinas pariwisata dengan pokdarwis Ada serangkaian langkah yang mengarah pada pemerintahan kolaboratif. Mekanisme dan tahapan tersebut mengacu pada konsep yang diuraikan oleh Ansel dan Gash (2007), yang membagi mekanisme pemerintahan kolaboratif ke dalam lima tahap utama, yaitu:

1. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Face to face dialogue ialah salah satu mekanisme awal dari *collaborative governance* yang dibangun lewat suatu kegiatan pertemuan dalam bentuk pertemuan langsung antar pihak yang terlibat dalam diskusi Dialog tatap muka tidak hanya dilaksanakan setelah pertemuan pertama tetapi berkelanjutan dan rutin dilaksanakan (Hidayat et al., 2024). Dialog tatap muka dalam kolaborasi terkait pengelolaan objek wisata paralayang wayu ini dilaksanakan oleh pemda (Pemerintah Daerah) sigi yaitu Dinas pariwisata sigi dengan pokdarwis (Tim sadar wisata) Indah wayu.

Jenis dialog tatap muka yang dilaksanakan oleh Dinas pariwisata yaitu dengan kunjungan yang ke objek wisata paralayang atau pihak pokdarwis yang berkunjung ke dinas pariwisata untuk membahas suatu persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata paralayang dan pokdarwis indah wayu mengadakan sosialisasi pada warga. Pertemuan yang dilakukan oleh Pemda dinas pariwisata sigi dan pokdarwis telah rutin dilaksanakan dalam setiap bulannya pasti mengadakan pertemuan meskipun tidak terjadwal dengan pasti.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti temukan fakta bahwa kolaborasi dalam Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan lewat dialog langsung oleh pemda sigi dan pokdarwis indah wayu dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata paralayang bisa dikatakan terjalin dengan baik, karena pertemuan rutin dilaksanakan sekalipun tidak terjadwal namun di setiap bulannya selalu mengadakan pertemuan. Selain itu juga pemda dinas pariwisata kabupaten sigi mengundang perangkat desa dalam rapat dengar opini MUSRENBANG.

Dialog tatap muka yang rutin antara Dinas Pariwisata Sigi dan Pokdarwis Indah Wayu merupakan contoh penerapan prinsip keterlibatan langsung dalam tata kelola kolaboratif. Pertemuan ini berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan rasa saling percaya, serta menyelaraskan visi dan misi pengelolaan wisata. Dialog yang konsisten, meskipun tidak selalu terjadwal secara formal, menunjukkan adanya komitmen dari kedua pihak untuk menjaga dinamika komunikasi yang terbuka. Selain itu, keterlibatan perangkat desa dalam forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mencerminkan partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan

demikian, mekanisme ini berpotensi memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan, memfasilitasi solusi bersama atas tantangan yang dihadapi, serta mendorong pengelolaan wisata yang lebih berkelanjutan. Namun, agar kolaborasi ini semakin optimal, perlu pengembangan jadwal pertemuan yang lebih terstruktur dan pencatatan hasil diskusi untuk memantau tindak lanjut dari setiap keputusan yang diambil.

2. Trust building (Membangun Kepercayaan)

Membangun keyakinan bahwa semua pihak punya tujuan yang sejalan dalam membuat keputusan yang menguntungkan bagi semua. Mekanisme pembangunan kepercayaan dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat (Nurdiansyah, 2024). Usaha yang membangun kepercayaan ialah salah satu cara antar *stakeholder* dalam upaya capai tujuan bersama, selain dari padaitu juga dengan membangun kepercayaan bisa Menangani perbedaan-perbedaan yang tak terelakkan dalam sebuah kolaborasi. Jika para pemangku kepentingan bisa menciptakan rasa saling percaya, maka mekanisme kolaborasi akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Kerja sama sejatinya bukan sekadar negosiasi antar pihak terkait, melainkan merupakan usaha untuk saling menciptakan kepercayaan antar mereka. Dengan itu, dalam mekanisme membangun kepercayaan ini, peran pemimpin yang menyadari pentingnya kolaborasi sangatlah krusial. Sebuah kegiatan bisa dikatakan telah menjalani mekanisme kolaborasi dalam tahap pembentukan kepercayaan apabila ada komitmen jangka panjang yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat, yang tercermin dari kesediaan mereka untuk menyumbangkan waktu, tenaga, bahkan sumber daya demi kelancaran kolaborasi tersebut.

Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata paralayang wayu penulis melihat mekanisme membangun kepercayaan antara pemda dengan ibu selvi masih sangat kurang. Perolehan ini terlihat dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis terkait dana yang telah disumbangkan objek wisata paralayang wayu lewat hasil menang lomba di awal tahun 2020 pasca new normal yang diadakan oleh menteri dalam negeri yang mana lomba dengan kategori kepariwisataan tersebut diikuti oleh pemda Sigi dengan mengangkat serta memperkenalkan kepariwisataan wayu.

Berdasarkan hasil wawancara Tindakan yang diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi pengelola objek wisata paralayang wayu . kurangnya trust disebabkan oleh kurang terbukanya *stakeholder* dari pihak pemerintah terhadap stakeholder dari non-pemerintah Dalam hal ini, ibu Selvi seharusnya punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam memikirkan dan mengusulkan alokasi dana dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu. Serta masih kurangnya pelaporan dana secara tertulis oleh pengelola pada pemda dinas pariwisata Sigi.

3. Commitment to Process (Komitmen dalam Mekanisme)

Komitmen terhadap mekanisme ialah kesepakatan untuk menjalankan langkah-langkah tertentu demi capai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Berbagi komitmen menandakan adanya ketergantungan timbal balik dalam mengatasi problem serta temukan pemecahan, dengan pemahaman bahwa mekanisme tersebut ialah tanggung jawab kolektif, serta keterbukaan untuk peroleh keuntungan bersama (Yasintha, 2020).

Komitmen merupakan sebuah rasa tanggungjawab yang muncul dari tiap pihak yang terlibat serta punya motivasi untuk ikut berpartisipasi dan melaksanakan kewajibannya dalam *Collaborative governance* (Mutiarawati & Sudarmo, 2021). Tingkat komitmen *stakeholder* dalam Kerja sama memegang peran krusial dalam menentukan suatu pencapaian atau kegagalan, di mana dedikasi dari setiap anggota menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan mekanisme kerja sama tersebut. Kesediaan untuk menghargai hasil diskusi bersama ialah langkah awal yang penting dalam menjalin mekanisme kolaborasi yang efektif.

Tidak sulit untuk pahami mengapa membangun kepercayaan menjadi aspek krusial dalam kolaborasi. Kepercayaan menjadi fondasi di mana komitmen bisa tumbuh, sebab setiap pihak perlu yakin bahwa perspektif dan kepentingan bersama akan dihormati (Haris & Hidayat, 2022). Selain itu, prosedur yang transparan, adil, dan terstruktur berperan besar dalam membangun keyakinan ini. Sebelum terlibat dalam suatu mekanisme yang hasilnya mungkin tidak terduga, para pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa musyawarah dan negosiasi dijalankan dengan prinsip kejujuran dan integritas. Seiring dengan meningkatnya partisipasi, rasa kepemilikan serta komitmen pun akan semakin kuat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa komitmen yang ada masih tergolong kurang terhadap mekanisme dari pengelola pokdarwis. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sehingga berpengaruh terhadap mekanisme kolaborasi antara pemerintah daerah dan pokdarwis yang menjadi tidak maksimal. Serta kurangnya inisiatif dan inovatif dari pokdarwis yang membuat wisatawan atau pengunjung tidak punya kesan dan kenangan selain dari pemandangan parlayang itu sendiri.

4. Share Understanding (Berbagi Pemahaman)

Saling berbagi pemahaman bisa berupa ekspansi pengetahuan, pemikiran atau opini untuk peroleh tujuan yang ingin dicapai serta berupaya untuk mewujudkannya. Selain itu juga bisa digambarkan dengan pemecahan problem yang ada dengan mencari pemecahan bersama. Saling berbagi pemahaman ialah Setiap pihak berusaha keras untuk mewujudkan tujuan dan visi misi yang telah disepakati bersama, namun tidak hanya itu tetapi juga mencari pemecahan atas suatu problem yang ada (Putri et

al., 2024).

Dari beberapa keterangan yang diperoleh menunjukkan share understanding sudah terlaksana dengan baik. Dalam hal ini antara pemerintah daerah dan pokdarwis serta warga sekitar saling berbagi pemahaman Untuk temukan jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi.

5. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Kolaborasi pada tahap hasil sementara mencakup produk yang dihasilkan dari aktivitas bersama, yang bisa dianggap konkret jika ada indikasi keberhasilan dalam kolaborasi tersebut. Meskipun output yang dihasilkan bisa terlihat nyata, esensi dari outcomes tersebut ialah untuk menciptakan momentum yang mengarah pada keberhasilan kolaborasi. Mekanisme ini tidak bisa dianggap sebagai hasil akhir yang final, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar.

Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata paralayang wayu telah berhasil membangun beberapa fasilitas di area paralayang sekalipun masih kurang di maksimalkan penggunaannya. Dalam taraf pelayanan tingkat kepuasan dari pengunjung pun bisa dikatakan belum terpenuhi. Sedangkan dampak bagi warga sekitar yaitu telah mendorong adanya usaha mikro , serta mengurangi angka pengangguran.

Adapun hasil sementara yang penulis ketahui yaitu berpindahnya paralayang yang tadinya di Wayu sekarang di bukit salena, alasan berpindahnya di karenakan jarak waktu menuju ke paralayang Wayu (atau di sebut paralayang matantimali) lebih menempuh waktu yang cukup lama, dan biaya yang di tarifkan untuk naik paralayang tersebut capai 100rb- 500rb. Untuk destinasi paralayang Wayu tersebut itu bisa dikatakan bahwa hari senin- jumat itu pengunjungnya sangat sedikit, maka bisa di bilang potensi penghasilan dari atlet paralayang itu sama sekali tidak ada. Jika dilihat dari bukit salena tersendiri akses menuju ke puncak itu jauh lebih cepat jarak tempuhnya di banding ke paralayang Wayu. Pada saat penulis datang ke salena pun itu hari senin – minggu pun lebih ramai dan ada selalu pengunjungnya. Maka bisa dilihat potensi untuk naik paralayang cukup besar.

Discussion / Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, masih menghadapi banyak masalah yang membuat tata kelola belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kerja sama antara Dinas Pariwisata Sigi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Indah Wayu, dan masyarakat sekitar belum berjalan lancar. Salah satu masalah besar adalah kurangnya komunikasi yang teratur dan tidak adanya jadwal pertemuan yang tetap. Meskipun pihak-pihak terkait sudah mengadakan dialog tatap muka, pertemuan tersebut jarang didokumentasikan, sehingga sulit untuk

mengevaluasi dan memperbaiki rencana yang sudah dibuat.

Selain itu, membangun kepercayaan antara pihak pemerintah, pengelola, dan masyarakat juga belum berhasil sepenuhnya. Ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan dana, khususnya dana promosi wisata, membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dengan baik. Hal ini menurunkan rasa percaya dan tanggung jawab bersama dalam mengelola wisata. Komitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan juga masih kurang terlihat. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur seperti jalan masuk ke area paralayang belum selesai, dan gedung cenderamata yang sudah dibangun mengalami kerusakan karena tidak dirawat dengan baik. Fasilitas lain seperti tempat duduk dan kamar mandi juga belum memadai, yang menyebabkan wisatawan merasa kurang nyaman.

Namun demikian, jumlah pengunjung Paralayang Wayu terus mengalami perubahan setiap tahun, dengan peningkatan pada waktu-waktu tertentu. Wisata ini tetap menarik perhatian banyak wisatawan lokal dan mancanegara karena keindahan pemandangan dan kegiatan paralayang yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa potensi wisata Paralayang Wayu masih sangat besar. Jika komunikasi dan kerja sama diperbaiki, transparansi dalam pengelolaan ditingkatkan, dan pengelolaan fasilitas dilakukan dengan lebih baik, tempat ini bisa menjadi destinasi unggulan yang lebih berkembang dan membawa manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat sekitar.

Conclusion / Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu telah terlaksana sebagian, terutama dalam aspek dialog tatap muka dan berbagi pemahaman antar stakeholder. Pertemuan rutin telah terjalin dengan baik, dan fasilitas di destinasi wisata sudah terpenuhi. Namun, aspek yang belum terlaksana dengan baik adalah membangun kepercayaan dan komitmen antar pemda Dinas Pariwisata Sigi dengan Pokdarwis. Kurangnya keterbukaan terkait dana dan transparansi, serta kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab Pokdarwis, menjadi kendala. Secara keseluruhan, meskipun ada kerja sama antara Dinas Pariwisata dan tim Sadar Wisata Indah Wayu, hasil yang diinginkan belum tercapai secara optimal.

Acknowledgments / Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa atas rahmat dan karunia-nya sehingga jurnal ini dapat di selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa jurnal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama orang tua penulis, pembimbing penulis, terimakasih atas bimbingan, masukan, dan arahnya yang sangat membantu dalam penulisan jurnal ini.

Dan terakhir kepada rekan penulis, terimakasih atas doa, dukungan moral, dan semangat yang membangun demi penyempurnaan karya masa mendatang. Akhir

kata, penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan.

References / Referensi

- Alvin Syahputra, K., & Farid Ma, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum03>
- Cooley, C. H. (2017). *Human nature and the social order*. Routledge.
- Damiasih, D., & Samudra, B. T. (2022). Peluang dan Tantangan Pengembangan Curug Gemawang sebagai Destinasi Ekowisata. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 285–294.
- Dewi, M. H. U. (2013). Ekspansi Desa Wisata Berbasis Partisipasi Warga Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/Kawistara.3976>
- Dewi, R. T. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Ekspansi Industri Kecil. *Universitas Sebelas Maret*, 1(1), 1–24.
- Faradin, S., & Fanida, E. H. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tirta Abadi melalui Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 9(3), 81–96.
- Feriyadin, F., Marswandi, E. D. P., Pratama, A. A., & Ulya, B. N. (2024). Manajemen Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal Maja Labo Dahu untuk Keberlanjutan Pariwisata Kota Bima. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(1), 51–65.
- Firmansyah, I., & Rahmat Program Pascasarjana Stia Yppt Priatim Tasikmalaya, B. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3.
- Haris, R. A., & Hidayat, I. (2022). PENGEMBANGAN WISATA BUKIT TAWAP LENG-LENG DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE. *PUBLIC CORNER*, 17(2), 72–90.
- Hidayat, M. W., Taufiq, A., & Rupiarsieh, R. (2024). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 541–550.
- Himayah, S., Somantri, L., Maryani, E., Ihsan, H. M., Aliyan, S. A., & Astari, A. J. (2023). Analisis Spasial Sebaran Lokasi Wisata Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 11(3), 299–307. <https://doi.org/10.23887/ljpg.v11i3.71876>
- Ibnu. (2021). *Tata Kelola Kawasan Mangrove Dalam Perspektif Governace Di Indonesia*.
- Idris, Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan

- Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)*, 6(3), 9810–9819.
- Junaidi. (2015). Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi UMRAH, 10–35. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2188/550>
- Junaid, I. (2019). Model sinergi unsur pentaheliks pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata Kota Parepare dan Kabupaten Bone. *Sosiohumaniora*, 21(1), 22.
- Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan waduk sei pulai di kota tanjungpinang. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 2(1), 11–20.
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (N.D.). Collaborative Governance (Studi Mengenai Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Ekspansi Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo).
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82–98.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati Affiliation, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. 02.
- Nugraha, R. N., & Manjorang, F. B. (2022). Kajian Kelengkapan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Terhadap Kepuasan Wisatawan di Destinasi Wisata Museum di Tengah Kebun Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6507–6518.
- Nurdiansyah, D. A. (2024). Collaborative Governance Pengembangan Pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3).
- Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 221–235.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Ode, L., Islamy, S., & Andriani, D. R. (2022). Mekanisme Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Collaborative Governance Process Of Village Fund Management. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Pancawati, A. P. A., & Widaswara, R. Y. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 166–178.
- Putra, A., As'ari, H., & Adiando, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Ekspansi Objek Wisata Di Rupan Utara Kabupaten Bengkalis. *Journal Publicuho*, 5(4), 1149–1161. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54>
- Putri, N. M. A. S., Purnamaningsih, P. E., & Supriyanti, N. W. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 47–57.
- Sari, P. N., Isabella, A. A., Nurahman, D., Nurhartanto, A., Nurhadi, S., Siregar, A. A., & Alyonni, A. (2024). Optimalisasi sumber daya manusia dalam manajemen pariwisata desa Way Tebing Cepa Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat:*

Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, 4(4).

Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881–894.

Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2008). Design for supply chain collaboration. *Business Process Management Journal*, 14(3), 401–418.
<https://doi.org/10.1108/1463715081087669>

Taning, N. P., Masyhudi, L., Hulfa, I., Idrus, S., & Martayadi, U. (2022). Pengaruh Fasilitas Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Alam Aik Nyet Desa Buwun Sejati. *Journal of Responsible Tourism*, 2(2), 379–392.

Tongkotow, N. F. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Di Kecamatan Ratatotok. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–11.

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23.